

FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION IN MSME MANAGEMENT TOWARDS FINANCIAL FREEDOM AND ECONOMIC INCLUSIVITY IN SAMPIT

Lina Apriliani¹,

¹ Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Darwan Ali, Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia

Herzalina Herbenita²

² Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Darwan Ali, Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: herbenita@unda.ac.id

Mahmudah³

³ Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Darwan Ali, Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia

Lidiya⁴

⁴ Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Darwan Ali, Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia

Rosmeilina⁵

⁵ Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Darwan Ali, Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia

Anggreini⁶

⁶ Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Darwan Ali, Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia

History of Article : received November 2025, accepted June 2026, published June 2026

Abstract - This study examines how financial literacy and financial inclusion contribute to improving financial management practices among MSME actors in Sampit City, particularly in their efforts to achieve financial independence as the foundation for a more inclusive local economy. The research adopts a quantitative approach with descriptive and associative designs, while respondents are selected using purposive sampling. A total of 65 active MSME participants were involved, responding to a questionnaire developed based on objective-based measurement. The data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression with the support of SPSS. The findings reveal that financial literacy has a positive and significant effect on the quality of MSME financial management. Around 72% of respondents demonstrate a high level of financial literacy, especially in bookkeeping, risk management, and the utilization of financial products such as KUR. Financial inclusion also shows a positive influence, reflected in the high share of business account ownership (74%) and the use of digital payment services (62%). These two aspects help MSMEs manage cash flow more effectively, plan business needs, and strengthen their financial independence. Overall, the study reinforces that enhancing financial literacy and financial inclusion is a crucial step in accelerating Financial Freedom for MSMEs while promoting a more inclusive economic environment in Sampit City. The results align with national development priorities and support government programs that emphasize MSME transformation through digitalization and expanded access to formal financial services.

Keywords: Financial Freedom, Economic Inclusivity, Financial Literacy, Financial Inclusion, Financial Management.

Abstrak - Penelitian ini berfokus pada peran literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam memperbaiki praktik pengelolaan keuangan para pelaku UMKM di Kota Sampit, khususnya terkait upaya mencapai kemandirian finansial sebagai dasar terciptanya ekonomi lokal yang lebih inklusif. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dengan desain deskriptif dan asosiatif, sementara pemilihan responden dilakukan melalui purposive sampling. Sebanyak 65 pelaku UMKM aktif terlibat sebagai responden melalui kuesioner yang disusun berdasarkan objective-based measurement. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan UMKM. Sekitar 72% responden memiliki tingkat literasi keuangan yang tergolong tinggi, terutama dalam hal pencatatan keuangan, pengelolaan risiko, serta

pemanfaatan produk keuangan seperti KUR. Inklusi keuangan juga menunjukkan dampak positif, tercermin dari tingginya proporsi kepemilikan rekening usaha (74%) dan penggunaan layanan pembayaran digital (62%). Kedua aspek ini membantu UMKM memperbaiki pengaturan arus kas, menyusun rencana kebutuhan usaha, dan memperkuat kemandirian finansial mereka. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan langkah penting untuk mendorong percepatan *Financial Freedom* bagi UMKM sekaligus memperkuat ekonomi yang lebih inklusif di Kota Sampit. Temuan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan mendukung program pemerintah yang menitikberatkan pada transformasi UMKM melalui digitalisasi serta perluasan akses ke layanan keuangan formal.

Kata Kunci: *Financial Freedom*, Inklusivitas Ekonomi, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Pengelolaan Keuangan

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 mendorong perlunya penguatan sektor usaha yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap inklusivitas ekonomi adalah UMKM (Unit Mikro, Kecil dan Menengah) karena aktivitasnya tersebar di berbagai wilayah dan melibatkan banyak pelaku usaha kecil (Anggriani et al., 2023). UMKM dalam perekonomian Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan (Siregar et al., 2025) dan (Syaula et al., 2023). Kontribusi UMKM juga terlihat dari perannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai lebih dari 60%, penyerapan tenaga kerja hampir 97%, serta kontribusi ekspor sebesar 15,7% dari total ekspor nasional. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kontribusi ekspor UMKM pada tahun 2025¹. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah usaha, tetapi juga pada penguatan kapasitas pengelolaan keuangan, akses pembiayaan, dan kemampuan pelaku usaha untuk bertahan secara mandiri.

Kota Sampit memiliki posisi ekonomi yang cukup strategis di Kabupaten Kotawaringin Timur. Aktivitas perdagangan, kuliner, jasa, kerajinan, dan usaha olahan berkembang seiring dengan peran Sampit sebagai pusat distribusi barang dan jasa di wilayah sekitarnya. Data daerah menunjukkan jumlah pelaku UMKM yang besar, sehingga sektor ini menjadi bagian penting dalam menjaga perputaran ekonomi lokal. Akan tetapi, besarnya jumlah UMKM belum otomatis menunjukkan kuatnya kapasitas pengelolaan usaha. Banyak pelaku usaha masih menghadapi persoalan klasik, terutama pada akses pembiayaan, pencatatan keuangan, pemanfaatan layanan keuangan formal, dan kesiapan untuk masuk ke ekosistem digital.

Berdasarkan hasil mini survei yang dilakukan pada 26 pelaku UMKM di Kota Sampit, ditemukan bahwa 85% UMKM masih mengandalkan dana pribadi sebagai sumber permodalan. Selain itu, mayoritas pelaku UMKM menyatakan bahwa belum pernah atau bahkan merasa kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap bantuan permodalan dari Pemerintah. Pelaku UMKM juga mayoritas menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen usaha, dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkan platform digital untuk pemasaran. (Ratnawati, 2020) dan (Sambharkreshna et al., 2021) menjelaskan bahwa inklusi keuangan dapat mendukung kinerja UMKM melalui intermediasi keuangan dan akses modal. Karena itu, ketergantungan pada dana pribadi berpotensi membatasi penguatan modal kerja, pengelolaan arus kas, dan proses pelaku UMKM menuju *Financial Freedom*.

Pencapaian *Financial Freedom* pada UMKM tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pelaku usaha dalam memahami kondisi keuangan usahanya. Literasi keuangan membantu pelaku UMKM mengambil keputusan yang lebih terukur, terutama dalam pencatatan arus kas, penggunaan

¹<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>

pembiayaan, penyusunan rencana usaha, dan pengendalian risiko. (Hirawati et al., 2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan toleransi risiko berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengelola keuangan. Artinya, pemahaman keuangan tidak hanya berhenti pada pengetahuan tentang produk keuangan, tetapi juga tercermin dalam kehati-hatian pelaku usaha saat mengambil pinjaman, menyiapkan dana cadangan, dan memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan UMKM (Munthay & Sembiring, 2024); (Assanniyah & Setyorini, 2024) (Rumbianingrum & Wijayangka, 2018); (Mahawati et al., 2021) ; (Gunawan et al., 2020) dan (Kau et al., 2023) literasi keuangan yang baik membuat pelaku usaha cenderung lebih siap menyusun rencana keuangan, mengontrol penggunaan modal, dan menjaga stabilitas usaha. Meski begitu, hasil penelitian (Kusumaningrum et al., 2023) menunjukkan temuan berbeda, yaitu literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan. Perbedaan temuan ini memberi ruang bagi penelitian lanjutan, terutama pada konteks UMKM daerah seperti Kota Sampit.

Selain itu, terwujudnya *Financial Freedom* UMKM juga dapat dicapai melalui peningkatan inklusi keuangan dalam memanfaatkan akses terhadap layanan dan produk keuangan yang mendukung produktivitas usaha. Perkembangan layanan keuangan digital juga membuat inklusi keuangan UMKM tidak lagi terbatas pada akses terhadap rekening bank atau pinjaman formal. Penggunaan *financial technology*, seperti QRIS, transfer bank, dan aplikasi keuangan, mulai menjadi bagian dari aktivitas keuangan pelaku usaha. Inklusi keuangan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai kepemilikan rekening bank, tetapi juga sebagai kemampuan pelaku UMKM memanfaatkan layanan keuangan formal dan digital untuk mendukung aktivitas usaha. Perkembangan *financial technology*, QRIS, transfer bank, dan aplikasi keuangan membuat transaksi usaha menjadi lebih mudah ditelusuri. (Kautsar & Anjilini, 2023) menunjukkan bahwa *financial technology*, literasi keuangan, dan gaya hidup finansial memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan UMKM. Temuan tersebut memberi dasar bahwa akses digital saja belum cukup; pelaku usaha tetap membutuhkan kebiasaan finansial yang disiplin agar transaksi digital benar-benar membantu pengelolaan arus kas usaha.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan UMKM (Munthay & Sembiring, 2024); (Anwar et al., 2022) dan (Martono & Febriyanti, 2023). Akses terhadap rekening usaha, pembiayaan formal, dan pembayaran digital dapat membantu pelaku usaha mengelola transaksi secara lebih tertib. Meski demikian, (Assanniyah & Setyorini, 2024) dan (Kusumaningrum et al., 2023) menemukan inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa akses keuangan belum tentu menghasilkan pengelolaan yang baik apabila tidak diikuti kemampuan menggunakan layanan keuangan secara tepat.

Literatur penelitian terdahulu memiliki beberapa kesenjangan, sehingga penelitian ini kemudian memberikan sejumlah kebaruan dalam topik yang sama pada pelaku UMKM. Pertama, penelitian terdahulu menggunakan sampel yang terbatas pada pelaku UMKM yang telah beroperasi lebih dari satu tahun, memiliki legalitas formal, terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM, dan berusia produktif antara 22 hingga 35 tahun (Munthay & Sembiring, 2024); (Assanniyah & Setyorini, 2024); (Kau et al., 2023) dan (Kusumaningrum et al., 2023). Hal ini menyebabkan generalisasi hasil penelitian menjadi kurang representatif terhadap realitas UMKM yang lebih luas, khususnya yang belum formal, berskala mikro, atau dijalankan oleh pelaku usaha di luar rentang usia tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan inklusif terhadap pelaku UMKM di Sampit sehingga lebih aplikatif, relevan serta menysasar seluruh lapisan pelaku UMKM.

Kedua, dari segi pengukuran variabel, penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan skala *Likert* (ordinal) untuk mengukur tingkat literasi,

inklusi dan pengelolaan keuangan berdasarkan persepsi responden. Penelitian ini, pengukuran dilakukan secara lebih objektif dan faktual dengan menggunakan item pernyataan berbasis jawaban benar/salah atau variabel *dummy* (biner), yang lebih sesuai untuk mengukur pengetahuan dasar dan akses aktual terhadap literasi, inklusi dan pengelolaan keuangan. Teknik ini dikenal dengan metode *factual test* atau *objective-based measurement*, yang mengurangi bias subjektif dan meningkatkan akurasi data serta memberikan gambaran nyata tentang literasi, inklusi dan pengelolaan keuangan UMKM di Sampit.

Pentingnya penelitian ini sejalan dengan program BUMIKU ELOK (Bina UMKM Mendukung Iklim Kondusif Ekonomi Lokal) yang merupakan program kolaborasi Kemenkeu Satu (Bea Cukai Sampit, KPP, dan KPPN) guna mendorong kemandirian pelaku UMKM dan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif di daerah. Program ini dirancang untuk memberikan pendampingan komprehensif bagi pelaku UMKM dimulai dari edukasi literasi keuangan, pelatihan produksi, hingga pemasaran dan perluasan akses pembiayaan. Program ini merancang UMKM *Empowerment Forum* (UEF) guna memperkuat posisi Sampit sebagai wilayah yang aktif dengan mengembangkan model sinergi antara pemerintah, akademisi, asosiasi UMKM, dan lembaga keuangan².

Penelitian ini relevan dalam konteks upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Arah pembangunan dalam dokumen Asta Cita, khususnya poin ke-5 dan 6 yang menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas rakyat melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi kreatif. Ini sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan inklusif berbasis daerah. Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia memainkan peran strategis sebagai penggerak transformasi UMKM di Indonesia. Melalui berbagai program seperti digitalisasi UMKM, perluasan penggunaan QRIS, akselerasi inklusi keuangan, serta pelatihan kewirausahaan dan manajerial, Bank Indonesia turut memperkuat ekosistem UMKM agar mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan global

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana literasi dan inklusi keuangan dapat memperkuat pengelolaan UMKM menuju *Financial Freedom*, serta bagaimana kondisi tersebut dapat mendorong terciptanya inklusivitas ekonomi di Kota Sampit. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana literasi dan inklusi keuangan pelaku UMKM di Kota Sampit, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan UMKM melalui literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan UMKM menuju *Financial Freedom*. Literasi keuangan menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam memahami, menilai, dan mengelola keputusan keuangan secara lebih tepat, termasuk dalam menentukan sumber pembiayaan, menyusun perencanaan keuangan, serta mengantisipasi risiko usaha. Inklusi keuangan menggambarkan tingkat akses dan pemanfaatan pelaku UMKM terhadap layanan keuangan formal, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, serta sistem pembayaran digital. Semakin baik literasi dan inklusi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin besar pula kemampuan mereka dalam mengelola keuangan usaha secara mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam pencapaian *Financial Freedom*, yang tercermin dari stabilitas keuangan, rendahnya ketergantungan pada utang konsumtif, kemampuan mengendalikan arus kas, kemandirian dalam membiayai kebutuhan usaha, serta tersedianya cadangan dana untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. (Anwar et al., 2022); (Widhiastuti et al., 2024); (Munthay & Sembiring, 2024); (Assanniyah & Setyorini, 2024) dan (Kau et al., 2023).

²<https://www.beacukai.go.id/berita/kemenkeu-satu-siap-kawal-peningkatan-kualitas-umkm-di-sampit-dan-banyumas.html>

METODE PENELITIAN

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci definisi operasional, indikator, jumlah item, serta sistem pengukuran yang digunakan untuk mengukur setiap variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu literasi keuangan (X1), inklusi keuangan (X2), dan pengelolaan keuangan dengan pendekatan *financial freedom* (Y). Instrumen penelitian disusun dengan mengacu pada konsep literasi keuangan, inklusi keuangan, serta pengelolaan keuangan UMKM sebagaimana digunakan dalam penelitian (Anwar et al., 2022); (Widhiastuti et al., 2024); (Munthay & Sembiring, 2024), serta disesuaikan dengan konteks UMKM di Kota Sampit. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan pendekatan *objective-based measurement* dengan sistem *factual test* dan pengukuran berbasis kondisi aktual responden, sehingga mampu mengurangi bias persepsi responden dibandingkan dengan penggunaan skala Likert.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Jumlah Item	Skor per Item	Rentang Skor
Literasi Keuangan (X1)	Kemampuan pelaku UMKM dalam memahami konsep dasar keuangan dan menerapkannya dalam pengelolaan usaha	Pengetahuan produk keuangan	4	0–1	0–8
		Perilaku keuangan	4	0–1	
		Total Literasi Keuangan	8		
Inklusi Keuangan (X2)	Tingkat akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh pelaku UMKM	Kepemilikan rekening usaha	1	0–1	0–4
		Akses pinjaman formal	1	0–1	
		Penggunaan pembayaran digital	1	0–1	
		Kepemilikan asuransi usaha	1	0–1	
		Total Inklusi Keuangan	4		
Pengelolaan Keuangan (Y)	Kemampuan pelaku usaha untuk merencanakan, mengelola dan mengatur keuangan usaha untuk mencapai <i>financial freedom</i>	Perencanaan keuangan	2	0–1	0–6
		Pengelolaan arus kas	2	0–1	
		Manajemen utang	2	0–1	
		Total Pengelolaan Keuangan	6		

Sumber: Data Olahan (2025)

Contoh item literasi keuangan adalah pernyataan mengenai pemahaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta pentingnya pencatatan keuangan. Contoh item inklusi keuangan meliputi kepemilikan rekening usaha, penggunaan layanan pinjaman formal, dan penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Sementara itu, contoh item pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran usaha, pengelolaan pinjaman, dan penyediaan dana cadangan usaha. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan asosiatif. Desain deskriptif digunakan untuk memaparkan kondisi literasi keuangan, inklusi keuangan, serta pengelolaan keuangan pelaku UMKM di Kota Sampit. Sementara itu, desain asosiatif digunakan untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM dalam kerangka *financial freedom*.

Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM yang berada di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *non-probability sampling* melalui pendekatan *purposive sampling*. Kriteria responden yang ditetapkan adalah pelaku UMKM aktif dan telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya selama satu bulan. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini memperoleh 65 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung serta melalui media digital, seperti WhatsApp dan Instagram. Instrumen penelitian disusun berdasarkan konsep literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pengelolaan keuangan UMKM yang merujuk pada penelitian terdahulu, kemudian disesuaikan dengan karakteristik UMKM di Kota Sampit.

Pengukuran variabel menggunakan sistem skor dummy, di mana setiap jawaban benar atau "ya" diberikan skor 1, sedangkan jawaban salah atau "tidak" diberikan skor 0. Variabel literasi keuangan diukur menggunakan 8 item pertanyaan dengan rentang skor 0 sampai 8. Variabel inklusi keuangan diukur menggunakan 4 item pertanyaan dengan rentang skor 0 sampai 4. Variabel pengelolaan keuangan diukur menggunakan 6 item pertanyaan dengan rentang skor 0 sampai 6. Selanjutnya, skor total dikonversi ke dalam bentuk persentase menggunakan rumus berikut:

$$\text{Skor Variabel} = \text{Skor diperoleh} / \text{Skor maksimum} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Dengan demikian, nilai variabel berada pada rentang 0 sampai 100, di mana semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pengelolaan keuangan yang semakin baik. Skor total masing-masing variabel selanjutnya digunakan sebagai variabel numerik dalam analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- Y = Pengelolaan keuangan UMKM
- α = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- X1 = Literasi keuangan
- X2 = Inklusi keuangan
- e = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada 65 UMKM yang ada di Kota Sampit diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik responden penelitian pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase %
Jenis UMKM	Kuliner	40	61,54%
	Jasa	13	20,00%
	Agribisnis	6	9,23%
	Fashion	3	4,62%
	Industri Pengolahan	3	4,62%
Lama Usaha (Tahun)	<1 Tahun	12	18,46%
	>1-5 Tahun	26	40,00%
	>5-10 Tahun	19	29,23%
	>10 Tahun	8	12,31%

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase %
Kepemilikan Izin Usaha	Ya	30	46,15%
	Tidak	35	53,85%

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebesar 61,54% responden adalah UMKM yang bergerak di sektor kuliner, sehingga sektor ini merupakan sektor yang paling banyak dipilih oleh pelaku UMKM di Sampit. Dominasi ini menunjukkan bahwa sektor kuliner ini mencerminkan tingginya potensi dan permintaan pasar di Kota Sampit terhadap produk makanan dan minuman. Hal ini juga menandakan perlunya strategi diferensiasi usaha, peningkatan standar kualitas, serta penguatan pengelolaan keuangan agar mampu bersaing secara berkelanjutan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Mayoritas UMKM telah menjalankan usahanya selama satu hingga lima tahun, yaitu sebesar 40%. Sementara itu, sebanyak 29,23% telah menjalankan usaha selama lima hingga sepuluh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Sampit berada pada fase pertumbuhan dan pengembangan usaha. Pada tahap ini, pelaku usaha umumnya sudah melewati masa awal perintisan dan mulai menghadapi tantangan dalam hal penguatan manajemen keuangan, akses pembiayaan, serta perluasan pasar. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi faktor penting untuk mendukung keberlanjutan dan kemandirian finansial usaha mereka.

Selain itu, sebanyak 53,85% responden diketahui belum memiliki izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya tingkat legalitas usaha dalam operasional UMKM di Kota Sampit. Minimnya legalitas ini dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, pendampingan legalitas, serta peluang untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan. UMKM di Sampit diharapkan lebih siap dalam menghadapi masalah bisnis dan berkembang secara berkelanjutan melalui dukungan untuk perizinan dan pengembangan kapasitas.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka dapat digambarkan tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Sampit. Literasi keuangan yang diukur melalui 8 pernyataan dengan jawaban benar atau salah yang kemudian dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori yaitu tinggi (70%-100%), sedang (40%-69%), dan rendah (0-39%). Berikut adalah tingkat literasi keuangan UMKM di Sampit.

Gambar 1. Literasi Keuangan UMKM di Sampit



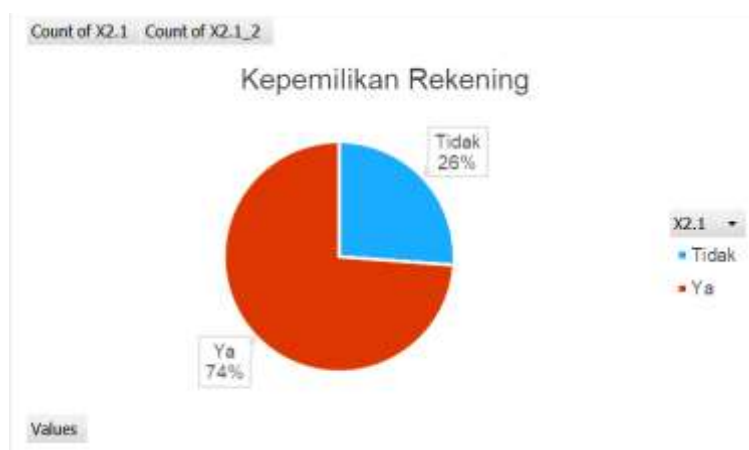
Sumber: Data Olahan (2025)

Temuan pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa 72% responden berada pada kategori literasi keuangan tinggi, sedangkan 28% lainnya berada pada kategori sedang. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Sampit telah memahami aspek dasar keuangan usaha, terutama pencatatan arus kas, pemisahan dana usaha, pemanfaatan produk pembiayaan seperti KUR, serta

pengendalian risiko sederhana. Meski begitu, keberadaan responden pada kategori sedang tetap perlu diperhatikan karena kelompok ini berpotensi mengalami kesulitan saat menyusun rencana keuangan, menentukan kebutuhan modal, atau mengambil keputusan pembiayaan.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari 65 responden, maka dapat digambarkan inklusi keuangan pelaku UMKM di Kota Sampit. Inklusi keuangan diukur melalui 2 pernyataan yaitu terkait kepemilikan rekening bank khusus untuk usaha dan penerimaan pembayaran dari pelanggan melalui metode digital seperti QRIS atau transfer bank. Berikut adalah tingkat inklusi keuangan 65 pelaku UMKM di Sampit:

Gambar 2. Kepemilikan Rekening Usaha



Sumber: Data Olahan (2025)

Gambar 3. Pembayaran Metode Digital



Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3, sebanyak 74% responden telah memiliki rekening bank untuk keperluan usaha, sedangkan 62% responden telah menggunakan atau menerima pembayaran melalui QRIS maupun transfer bank. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Sampit telah memiliki akses terhadap layanan keuangan formal dan mulai memanfaatkan layanan keuangan digital dalam aktivitas usahanya. Kepemilikan rekening usaha dapat mendukung pemisahan transaksi pribadi dan transaksi usaha, sementara penggunaan pembayaran digital berpotensi membantu pencatatan arus kas secara lebih tertib. (Kautsar & Anjilini, 2023) menyatakan bahwa *financial technology*, literasi keuangan, dan gaya hidup finansial berhubungan dengan pengelolaan keuangan UMKM. Oleh karena itu, pemanfaatan QRIS dan transfer bank perlu disertai dengan

kemampuan pelaku usaha dalam mencatat transaksi, mengendalikan pengeluaran, serta menentukan prioritas keuangan usaha agar penggunaan teknologi keuangan benar-benar mendukung kualitas pengelolaan keuangan UMKM.

Gambar 4. Pengelolaan UMKM



Sumber: Data Olahan (2025)

Hasil ini menunjukkan bahwa 68% pelaku UMKM di Kota Sampit telah memiliki pemahaman dan penerapan pengelolaan keuangan yang cukup baik, khususnya dalam konteks kemandirian finansial (*Financial Freedom*). Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam mengelola keuntungan usaha secara bijak, menyusun cadangan dana darurat, serta menyesuaikan pinjaman usaha dengan kapasitas pembayaran. Kemampuan ini menjadi fondasi penting bagi kelangsungan dan kestabilan usaha. Meskipun demikian, sebesar 32% pelaku usaha masih berada pada kategori sedang dalam hal pengelolaan keuangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi berupa edukasi keuangan dan pendampingan yang lebih intensif, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya dan mencapai kemandirian finansial secara optimal.

Berdasarkan hasil pengujian data menggunakan aplikasi SPSS, diketahui bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi syarat asumsi klasik, sehingga layak untuk dilakukan analisis regresi linier berganda. Berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik:

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Metode	Kriteria	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	Sig. > 0,05	0,189	Data berdistribusi normal
Multikolinieritas	VIF	VIF < 3	X1: 1,017 ; X2: 1,017	Tidak terjadi multikol
Heteroskedastisitas	Breusch Pagan	Sig. > 0,05	1,683	Tidak terjadi hetero

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficients	Sig. / Prob	Keterangan
Constanta	0,487	0,000	Positif Signifikan
Literasi Keuangan (X1)	0,320	0,006	Positif Signifikan
Inklusi Keuangan (X2)	0,104	0,026	Positif Signifikan

Variabel Dependen (Y) : Pengelolaan Keuangan
Jumlah Data (N) : 65

Sumber: Data Olahan (2025)

Hasil analisis pada tabel menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan UMKM dengan pendekatan *Financial Freedom*. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep-konsep keuangan, semakin baik pula kemampuan mereka dalam mengelola keuangan usaha secara terarah. Pada penelitian ini, kondisi tersebut didukung oleh hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 72% responden memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Capaian tersebut mencerminkan adanya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pencatatan keuangan, perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, serta pemanfaatan produk keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Temuan ini sejalan dengan (Munthay & Sembiring, 2024); (Assanniyah & Setyorini, 2024); (Kau et al., 2023) dan (Widhiastuti et al., 2024), yang menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Pelaku UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang lebih baik cenderung memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam merencanakan kebutuhan modal, mengendalikan biaya operasional, menyusun perencanaan keuangan, serta menjaga stabilitas keuangan usaha. Dalam pendekatan *Financial Freedom*, literasi keuangan menjadi landasan penting bagi pelaku UMKM untuk membentuk pola pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, terarah, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan UMKM dengan pendekatan *Financial Freedom*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akses dan pemanfaatan pelaku UMKM terhadap layanan keuangan formal, seperti tabungan usaha, pinjaman produktif, serta sistem pembayaran digital, semakin besar pula peluang mereka untuk mengelola keuangan usaha secara lebih efektif. Akses terhadap layanan keuangan formal dapat membantu pelaku usaha dalam mengatur arus kas, membangun cadangan keuangan, memperoleh sumber pembiayaan yang lebih produktif, dan mengambil keputusan finansial secara lebih mandiri. Kondisi tersebut juga didukung oleh mayoritas pelaku UMKM yang telah memiliki rekening bank khusus usaha serta mulai menggunakan metode pembayaran digital seperti QRIS atau transfer bank.

Temuan tersebut mendukung hasil penelitian (Munthay & Sembiring, 2024); (Anwar et al., 2022); (Martono & Febriyanti, 2023), yang menyatakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Inklusi keuangan memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan yang dapat menunjang aktivitas usaha secara lebih efisien. Dengan akses keuangan yang lebih baik, pelaku usaha tidak hanya memperoleh kemudahan dalam transaksi, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas usaha, dan mencapai kemandirian finansial atau *Financial Freedom* secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM melalui pendekatan *Financial Freedom* di Kota Sampit. Kajian ini memandang pemahaman keuangan serta akses terhadap layanan keuangan formal sebagai aspek penting yang dapat memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha secara mandiri, terencana, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Pelaku usaha dengan literasi keuangan yang lebih baik cenderung lebih mampu mengatur arus kas, menyusun perencanaan keuangan, memahami manfaat produk keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta menerapkan pengelolaan risiko dalam kegiatan usaha.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Pelaku usaha yang memiliki akses serta mampu memanfaatkan layanan keuangan formal, seperti rekening bank, pembiayaan produktif, dan pembayaran digital melalui QRIS

atau transfer bank, memiliki peluang lebih besar untuk mengelola keuangan usaha secara lebih tertib dan efisien. Kepemilikan rekening usaha serta penggunaan sistem pembayaran digital dapat membantu pelaku UMKM memisahkan transaksi pribadi dan usaha, memantau arus kas, serta mengambil keputusan keuangan secara lebih rasional. Hasil ini menegaskan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam mendorong pemberdayaan UMKM menuju *Financial Freedom* serta memperkuat ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun hasil penelitian memperlihatkan capaian literasi dan inklusi keuangan yang cukup baik, pelaku UMKM di Kota Sampit belum sepenuhnya berada pada kondisi *Financial Freedom*. Masih terdapat 32% responden dalam kategori sedang pada aspek pengelolaan keuangan, yang menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum optimal dalam mengatur keuangan usahanya secara berkelanjutan. Selain itu, masih banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha, sehingga posisi legal dan administratif mereka belum cukup kuat untuk mendukung akses pembiayaan formal maupun pengembangan skala usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu diikuti dengan penguatan legalitas, pendampingan usaha, dan pembiasaan praktik keuangan yang lebih tertib.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Daerah perlu memperluas program edukasi dan pendampingan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelaku UMKM, terutama pada aspek pencatatan keuangan, manajemen kas, pengelolaan risiko, pemanfaatan produk keuangan formal, dan penggunaan layanan keuangan digital. Pemerintah daerah bersama Kemenkeu Satu, yang melibatkan Bea Cukai, KPP, dan KPPN Sampit, dapat mengintegrasikan hasil penelitian ini ke dalam pelaksanaan program BUMIKU ELOK untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan UMKM. Program pelatihan dapat diarahkan pada praktik harian pelaku usaha, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan modal kerja, pemanfaatan QRIS, serta prinsip kemandirian finansial. Bank Indonesia juga dapat berkontribusi melalui perluasan edukasi QRIS dan layanan keuangan digital bagi UMKM yang belum terdigitalisasi. Dukungan komunitas dan kemitraan dengan UEF diperlukan agar peningkatan literasi digital keuangan dapat berjalan searah dengan penguatan inklusi keuangan di Kota Sampit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, I., Armiani, & M.Wahyullah. (2023). Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Dompu. *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 119–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i3.89>
- Anwar, Sahabuddin, R., & Ruma, Z. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Makassar. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 879–890. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.447>
- Assanniyah, M., & Setyorini, H. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Kecamatan Tanggulangin. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 9(1), 36–49. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i1.3917>
- Gunawan, A., Pirari, W. S., & Sari, M. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(2), 23–35. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i2.1196>
- Hirawati, H., Sijabat, P. Y., & Giovanni, A. (2021). Financial Literacy, Risk Tolerance, and Financial Management of Micro-enterprise Actors. *Society*, 9(1), 174–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v9i1.277>
- Kau, M. A. S., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Pengelolaan Keuangan Umkm (Studi Pada Usaha Mikro Foodcourt

- Limboto). *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 651–659.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37531/mirai.v8i1.4606>
- Kautsar, A., & Anjilini, R. Q. (2023). Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Umkm. *Urnal Economina*, 2 (11), 3154–3167.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i11.790>
- Kusumaningrum, S. M., Wiyono, G., & Maulida, A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Sikap Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 227–238.
<https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.6867>
- Mahawati, E., Yuniwati, I., Ferinia, R., Rahayu, P. F., Fani, T., Sari, A. P., Setijaningsih, R. A., Fitriyanur, Q., Sesilia, A. P., Mayasari, I., & others. (2021). *Analisis Beban Kerja dan produktivitas kerja*. Yayasan Kita Menulis.
- Martono, S., & Febriyanti, R. (2023). Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kota Salatiga. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 11(2), 153–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jepk.v11n2.p153-168>
- Munthay, S. F., & Sembiring, M. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *Owner*, 8(1), 22–35. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1902>
- Ratnawati, K. (2020). The Influence of Financial Inclusion on MSMEs' Performance Through Financial Intermediation and Access to Capital. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 205–218.
https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002645094&utm_source
- Rumbianingrum, W., & Wijayangka, C. (2018). Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. *Almana: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 156–164.
- Sambharkreshna, Y., Kusumawati, F., & Wulandari, A. (2021). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dengan Pendekatan Kebebasan Keuangan , Teknologi Keuangan Dan Modal Sosial Terhadap Pendapatan Umkm Disektor Pariwisata. *The Seybold REPORT*, 1873–1886.
- Siregar, A. R. S., Lubis, N. H., Isfa, F., & Muzayyana. (2025). *Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia* (pp. 51–64). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i4.3424>
- Syaula, M., Amelia, O., & Purnomo, C. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Umkm Desa Kota Pari Dalam Peningkatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora E-ISSN: 2775 - 4049*, 125–133.
- Widhiastuti, R. N., Harianti, A., Suryowati, B., & Suzuda, S. (2024). Penyuluhan Literasi Keuangan Untuk Mencapai Financial Freedom Bagi Gen-Z. *Swadimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8–12. <https://doi.org/10.56486/swadimas.vol2no1.390>